

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Provinsi Jawa Tengah
2019



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Provinsi Jawa Tengah
2019



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH 2019

ISBN : 978-602-5419-91-1
No. Publikasi : 33520.2012
Katalog : 4601008.33
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21cm
Jumlah Halaman : vi + 43 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Penyunting :

Bidang Statistik Sosial

Desin Kover Oleh :

Bidang Statistik Sosial

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pencetak :

CV. Surya Lestari

Sumber Ilustrasi :

Unsplash.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah 2019 menyajikan analisis deskriptif hasil penghitungan IDI 2019 untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Jawa Tengah.

Publikasi dalam bentuk booklet ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, variabel, dan indikator IDI, yang ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Jawa Tengah.

Penyajian informasi diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabel, gambar serta uraian ringkas. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Oktober 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah

Sentot Bangun Widoyono M.A.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
I. Demokrasi	3
II. Apa itu IDI?	5
III. Mengapa IDI Diperlukan?	9
IV. Apa Manfaat IDI?	11
V. Bagaimana Metodologi IDI?	13
VI. Gambaran Umum IDI Indonesia	21
VII. IDI Jawa Tengah 2019	25
1. Indeks Aspek IDI	27
2. Indeks Variabel IDI	30
3. Skor Indikator IDI	33
VIII. Penutup	43

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019



77,22

↑ 5,05 poin

terdapat peningkatan
dibandingkan tahun
2018



IDI Jawa Tengah 2019 merupakan
capaian **IDI TERTINGGI** selama
5 tahun terakhir



IDI Jawa Tengah 2019
tergolong kategori **SEDANG**



IDI Jawa Tengah 2019
dipengaruhi oleh



aspek
demokrasi



KEBEBASAN
SIPIL



HAK-HAK
POLITIK



LEMBAGA
DEMOKRASI

I. Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi. Assiddiqie (2005: 242-245) mengidentifikasi tiga persoalan yang muncul dalam kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, hal yang paling nyata, meskipun 97 persen negara yang ada di zaman modern ini mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya di lapangan berbeda antara satu negara dengan yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, bahkan eks-Uni Sovyet semua mengklaim menganut demokrasi. Perbedaan ini antara lain karena adanya jarak konseptual antara kaum individualis dengan kaum kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah individu yang otonom sedangkan kaum kolektivis-komunis menganggap rakyat yang berdaulat dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*). *Kedua*, demokrasi juga mendapat tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat. *Ketiga*, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat

dalam kenyataan beragamnya cara orang mempraktekkan, seringkali dipraktekkan secara sepihak oleh para penguasa. Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan konsepsi tersebut, tidak ada jaminan jika demokrasi menjadi *deficit*¹⁾ sebagai jargon penguasa. Diperlukan instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi dan perkembangannya di berbagai negara. Beberapa lembaga internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. *Freedom House* misalnya, sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries, partly free*.

1) *Defisit demokrasi terjadi karena melencengnya demokrasi dari tujuan awalnya, Dimana demokrasi dengan cita-cita awalnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu keadilan sosial ternyata pada kenyataannya tidak dijalankan dengan baik.*

II. Apa itu IDI ?

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Sejak tahun 2009, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini disusun oleh BPS dan Kemenko Polhukam, didukung oleh Bappenas, Kemendagri, dan UNDP. Sejak IDI 2016, UNDP sudah tidak terlibat dalam penyusunan IDI.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific* dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya, IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia, yaitu antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode reformasi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang

dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Empat prinsip dasar penyusunan IDI, antara lain:

1. IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi.
2. IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi. Dalam hal ini, IDI dapat diumpamakan sebagai sketsa yang memberikan gambaran yang cukup akurat, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak pula dikurang-kurangkan sehingga mengalami distorsi.
3. IDI juga digunakan untuk mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat. Pada konteks inilah, variabel dan indikator IDI tidak saja diarahkan pada upaya “merekam” kinerja kelembagaan demokrasi (*structure*), tetapi juga kinerja perilaku dari para pelaku demokrasi (*agencies*) yang terlibat, baik dari ranah masyarakat maupun negara.
4. IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman adil, dan sejahtera. Untuk mencapai hal ini, IDI diharapkan menjadi rujukan baik dalam melakukan kajian-kajian akademis maupun dalam memformulasikan kebijakan dan program pembangunan politik. Terkait dengan formulasi

kebijakan dan pembangunan politik, IDI memang harus dikaitkan dengan tindak lanjut yang konkrit.

<https://jateng.bps.go.id/>

III. Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah lebih dua dasawarsa berjalan sejak Reformasi pada tahun 1998, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi yang telah terjadi, khususnya pada tingkat provinsi. Sebab, selama ini perbedaan kinerja demokrasi antardaerah, walaupun dapat dirasakan, namun tidak dapat digambarkan secara jelas dalam aspek-aspek atau faktor-faktor penyumbangannya. Upaya menjelaskannya biasanya terbatas pada pemahaman yang parsial dan tidak disertai data empirik yang kuat.

Perbedaan kinerja demokrasi antardaerah, biasanya, dikaitkan dengan faktor struktural (tingkat perkembangan ekonomi), kultural (agama), dan sosio-historikal (tingkat pendidikan, homogenitas/heterogenitas demografi) secara umum tanpa bukti empiris yang lebih spesifik.

Penjelasan-penjelasan tersebut acap menciptakan perspektif yang sumir dan spekulatif, sehingga tidak banyak bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga dan memacu perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tidak adanya ukuran yang obyektif juga menyulitkan perbandingan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain; sulitnya mendapatkan *lesson learned*, dan diseminasi dari praktik-praktik yang baik, sehingga langkah-langkah kongkrit untuk pembangunan demokrasi sulit direncanakan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif yang diharapkan memicu diskursus²⁾ di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

- 2) *diskursus adalah sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Diskursus dibangun oleh asumsi-asumsi yang umum yang kemudian menjadi ciri khas dalam pembicaraan baik oleh suatu kelompok tertentu maupun dalam suatu periode sejarah tertentu-*

IV. Apa Manfaat IDI?

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat, utamanya adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia yang didasarkan atas data-data dengan tolok ukur yang jelas. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia,
2. Bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi, data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses deliberasi perumusan kebijakan dan program pembangunan politik/ demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.
3. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan

penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

<https://jateng.bps.go.id>

V. Bagaimana Metodologi IDI?

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan terdapat tiga tahapan pengumpulan data IDI, yaitu:

1. Review surat kabar dan review dokumen

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data *kuantitatif* (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan 3 Aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI 2019.

Penggunaan dokumen sebagai sumber data IDI tidak menuntut banyak penjelasan. Karena pada dasarnya, dokumen resmi merupakan sumber data yang layak dan biasa dipakai dalam banyak penelitian. Penggunaan media, khususnya surat kabar, sebagai sumber data untuk mengukur demokrasi mungkin tidak lazim digunakan, sebab itu perlu mendapatkan penjelasan khusus.

IDI berpendapat, surat kabarliah yang merekam kehidupan daerah, termasuk didalamnya denyut demokrasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari. Bukan berarti surat kabar tidak memiliki kelemahan. IDI sepenuhnya menyadari keterbatasan surat kabar seperti

kemungkinan bias-bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Namun, disamping keterbatasan tersebut dan dengan asumsi surat kabar di Indonesia adalah surat kabar yang bebas dan merupakan sumber data mengenai demokrasi provinsi yang cukup baik terlebih dalam hal yang berkaitan dengan gairah spontan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di daerah.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media surat kabar, dan untuk ini telah dipilih satu surat kabar, yakni surat kabar lokal dengan oplah tertinggi. Provinsi Jawa Tengah menggunakan surat kabar Suara Merdeka. Sementara untuk *review* dokumen, yang digunakan adalah semua dokumen resmi (tertulis) yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, *press release*, Perda, surat edaran, maupun surat keputusan serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian, dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) IDI

Focus Group Discussion (FGD) dapat didefinisikan sebagai sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998:1). Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangkau data *kualitatif* berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah, pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data *kualitatif*) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen.

3. Wawancara Mendalam (WM) IDI

Dilakukan untuk menjangkau fakta/kejadian yang mungkin masih terlewat, atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya, karena tidak memungkinkan dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Nara sumber WM adalah orang-orang terpilih yang memang banyak mengetahui fakta tertentu yang terkait indikator IDI.

Seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Dari tiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 variabel yang kemudian dijabarkan lagi melalui 28 indikator teknis.

Penyusunan IDI dilakukan dengan cara skoring yang terdiri dari dua level yaitu level 1 merupakan skoring data kuantitatif sesuai temuan *review* surat kabar dan *review* dokumen dan level 2 merupakan skoring data kualitatif melalui *expert judgement*.

Skoring data kuantitatif (hasil *review* surat kabar dan dokumen) bersifat *complementary data* yang artinya data tertinggi/terbesar hasil pengukuran pada *review* Koran atau *review* dokumen diambil sebagai perhitungan skor. Sedangkan *skoring* data kualitatif (hasil FGD dan *in-depth interview*), pembobotan per kasus ditetapkan sebesar 75 persen dibanding kasus yang berasal dari surat kabar. Untuk informasi tentang aturan tertulis tetap dihitung 100 persen.

Tahapan selanjutnya, masing-masing aspek, variable dan indikator IDI dibobot oleh juri ahli (*expert judge*) yang terdiri dari unsur perempuan, akademisi, praktisi/politisi, pejabat

pemerintahan, NGO/LSM dan purnawirawan TNI/Polri, dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan angka IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi

ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Sejak tahun 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” **sebelumnya** “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” **sebelumnya** “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.

Tabel 1. Komponen Penghitungan IDI, 2009 – 2019

Aspek	Varibel	Indikator
(1)	(2)	(3)
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
3. Lembaga Demokrasi	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

VI. Gambaran Umum IDI Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional tahun 2019 mencapai **74,92** dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI 2018 yang capaiannya sebesar 72,39. Meskipun mengalami perbaikan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih dalam kategori “sedang”.

Angka IDI 2019 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni:

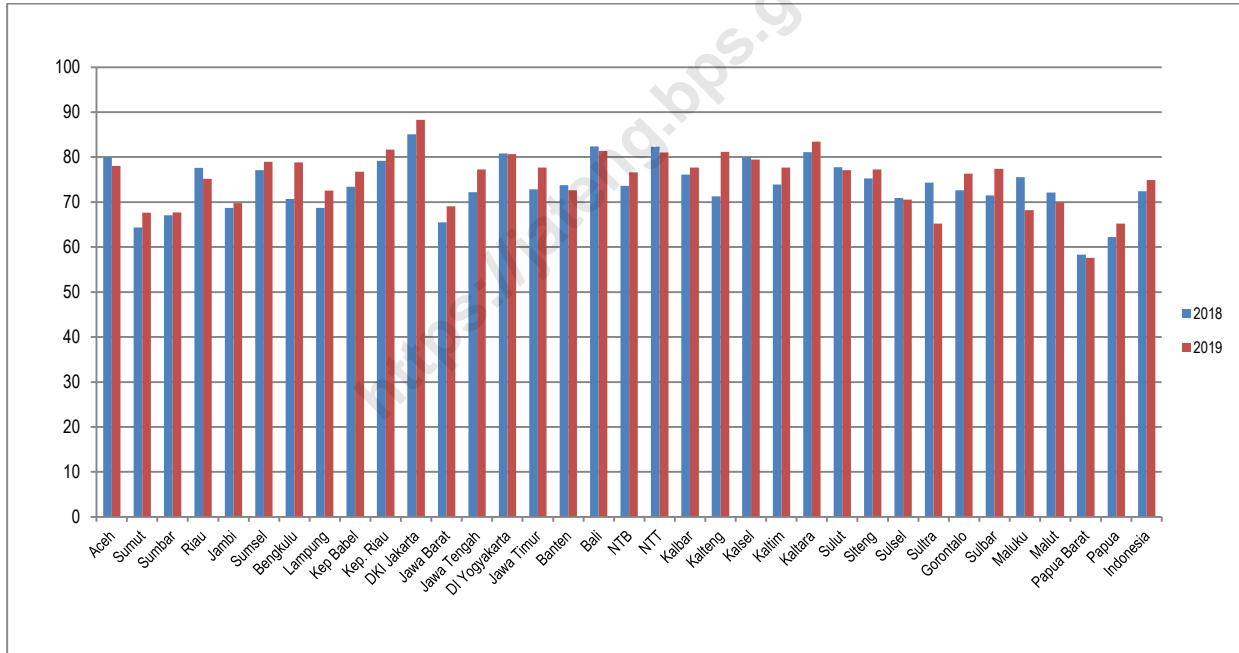
- Aspek Kebebasan Sipil tidak terlalu fluktuatif dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek Kebebasan Sipil pernah berada pada kategori “baik” pada periode 2009–2011 dan 2014–2015, serta mengalami titik terendah pada tahun 2016 sebesar 76,45 poin. Aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2019, dengan rata-rata nasional 77,20.
- Aspek Hak-hak Politik berada pada kategori “buruk” pada periode 2009–2013, sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada periode 2013–2015, dari 46,25 menjadi 70,63 poin. Setelah 2015–2018, aspek Hak-hak Politik menunjukkan tren menurun, walaupun masih dalam kategori “sedang”. Pada 2019, aspek Hak-hak Politik mencapai titik tertinggi sebesar 70,71 poin.

- Aspek Lembaga Demokrasi selama periode 2009–2019 selalu berada pada kategori “sedang” dengan capaian terendah pada 2016 sebesar 62,05 dan tertinggi pada 2019 sebesar 78,73 poin. Aspek Lembaga Demokrasi pada Tahun 2019 sebesar 78,73.

Pada periode 2018–2019, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik” meningkat dari 5 provinsi menjadi 7 provinsi. Terdapat 1 provinsi yang masuk ke kategori “buruk”, yaitu Papua Barat, sementara 26 provinsi lainnya berada pada kategori “sedang”. DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 88,29; diikuti oleh Kalimantan Utara dengan nilai IDI sebesar 83,45. Posisi ketiga adalah Kepulauan Riau dengan nilai IDI sebesar 81,64. Posisi keempat ditempati oleh Bali dengan capaian IDI sebesar 81,38.

Dibandingkan dengan capaian IDI pada 2018, terdapat 21 provinsi mengalami peningkatan dan 13 provinsi mengalami penurunan angka IDI di 2019. Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Kalimantan Tengah dan Bengkulu, masing-masing meningkat sebesar 9,89 poin dan 8,08 poin. Sementara, 2 provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Sulawesi Tenggara dan Maluku, masing-masing menurun sebesar 9,11 poin dan 7,29 poin.

Grafik 1
Perkembangan IDI berdasarkan Provinsi, 2018-2019

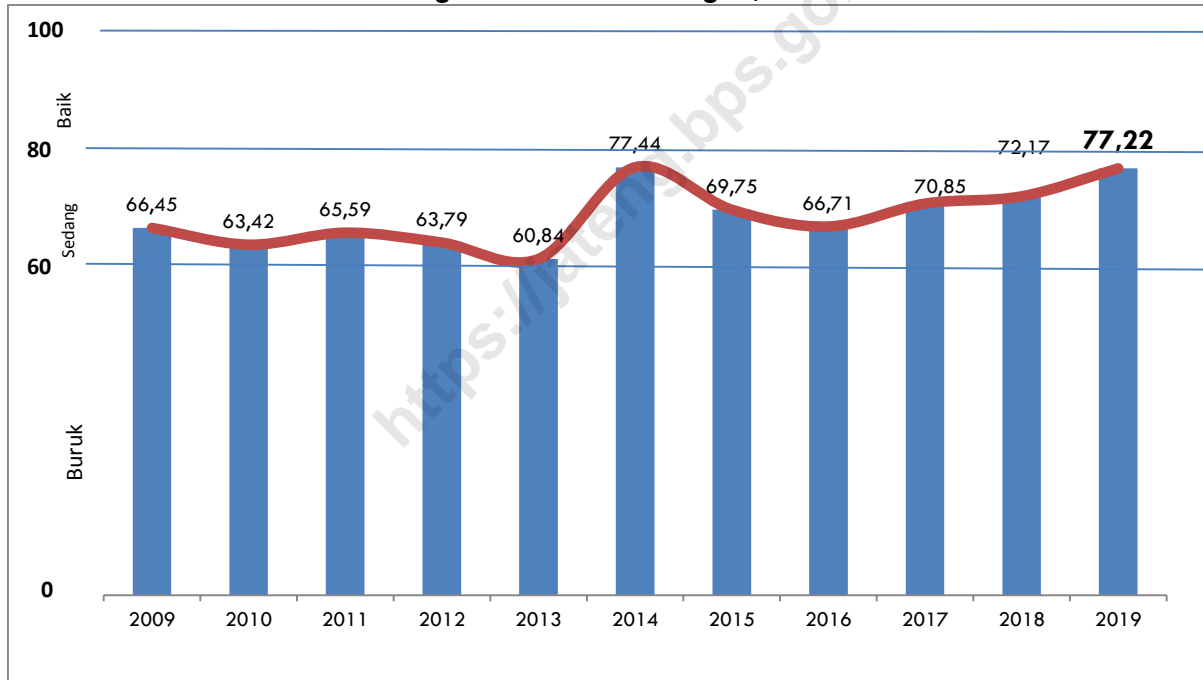


VII. IDI Jawa Tengah 2019

Pada tahun 2019 capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah mencapai **77,22 poin**. Dalam kategori yang digunakan IDI, capaian ini tergolong “sedang”, artinya IDI melihat kualitas demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kondisi “Sedang”. Capaian tahun 2019 tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2018 sebesar **72,17**. Peningkatan 5,05 poin secara kualitatif belum bisa mengubah kategori kualitas capaian secara keseluruhan, yaitu masih tetap dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mulai dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 66,45. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 77,44, namun kembali turun hingga 2016, dan membaik sejak 2017, yaitu menjadi 70,85 dan terus naik menjadi 77,22 pada tahun 2019.

Grafik 2
Perkembangan IDI di Jawa Tengah, 2009 – 2019



IDI dirancang untuk menangkap denyut nadi demokrasi dalam tahun yang diukur. Indikator-indikator penyusunnya dimaksudkan untuk menangkap demokrasi sebagaimana tercermin pada kejadian sehari-hari. Sebagaimana denyut nadi, capaian IDI bisa naik dan turun berdasarkan banyaknya “peristiwa-peristiwa” yang sesuai dengan demokrasi atau sebaliknya bertentangan dengan demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di suatu wilayah.

1. Indeks Aspek IDI

Angka IDI 2019 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 78,43; aspek Hak-hak Politik yang bernilai 67,91; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 90,50.

Tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Indeks aspek Kebebasan Sipil meningkat 2,22 poin dibandingkan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai angka 76,21. Indeks aspek Hak-hak Politik juga mengalami peningkatan sebesar 0,99 poin dibandingkan perolehan pada tahun 2018

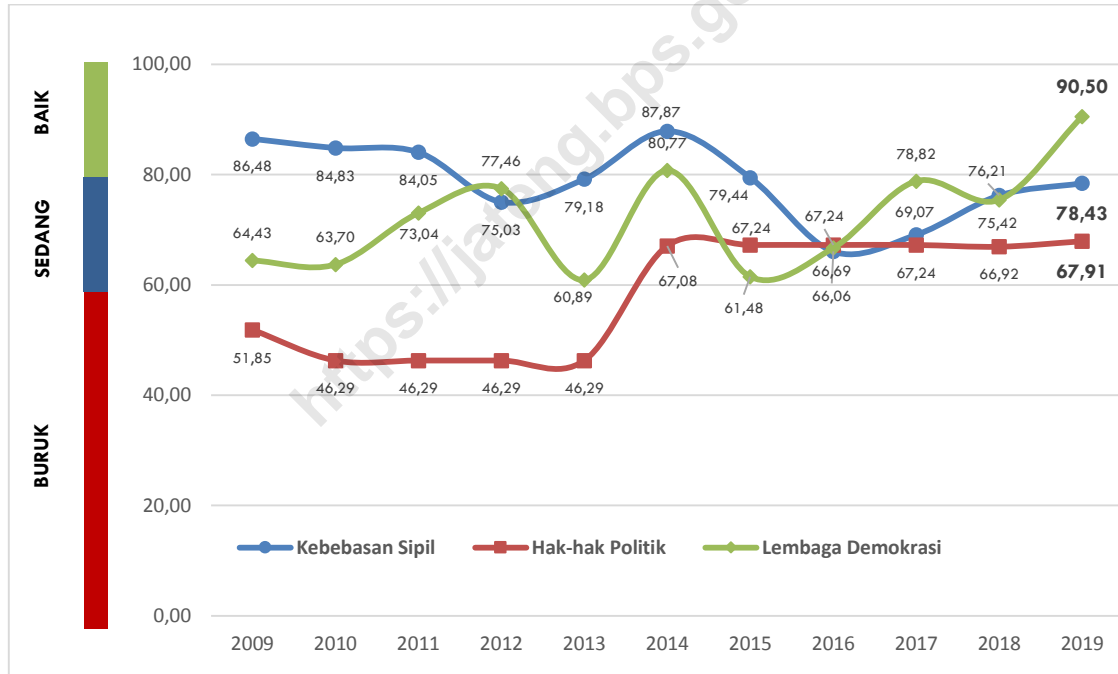
sebesar 66,92. Demikian pula dengan nilai indeks Lembaga Demokrasi naik sebesar 15,08 poin dari angka 75,42 pada tahun 2018.

Serupa dengan kondisi pada tahun 2018, tidak lagi ditemukan indeks aspek yang berkategori “buruk” pada tahun 2019. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun, pada 2012 hingga 2019 aspek ini menjadi kategori “sedang”, kecuali pada tahun 2014 yang kembali mencatat kategori “Baik”.

Sementara itu, pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013 tercatat stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, ketika aspek ini menembus kategori “sedang”, dan bertahan sampai dengan 2019.

Capaian aspek Lembaga Demokrasi dalam IDI Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 90,50 poin, naik 15,08 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018, yaitu 75,42 poin. Capaian tahun 2019 ini merupakan capaian tertinggi selama pengukuran 2009 hingga 2018. Capaian tahun 2019, Aspek Lembaga Demokrasi mengulang kembali capaian kategori “baik” seperti pada tahun 2014.

Grafik 3
Perkembangan Indeks Aspek IDI di Jawa Tengah, 2009 – 2019



2. Indeks Variabel IDI

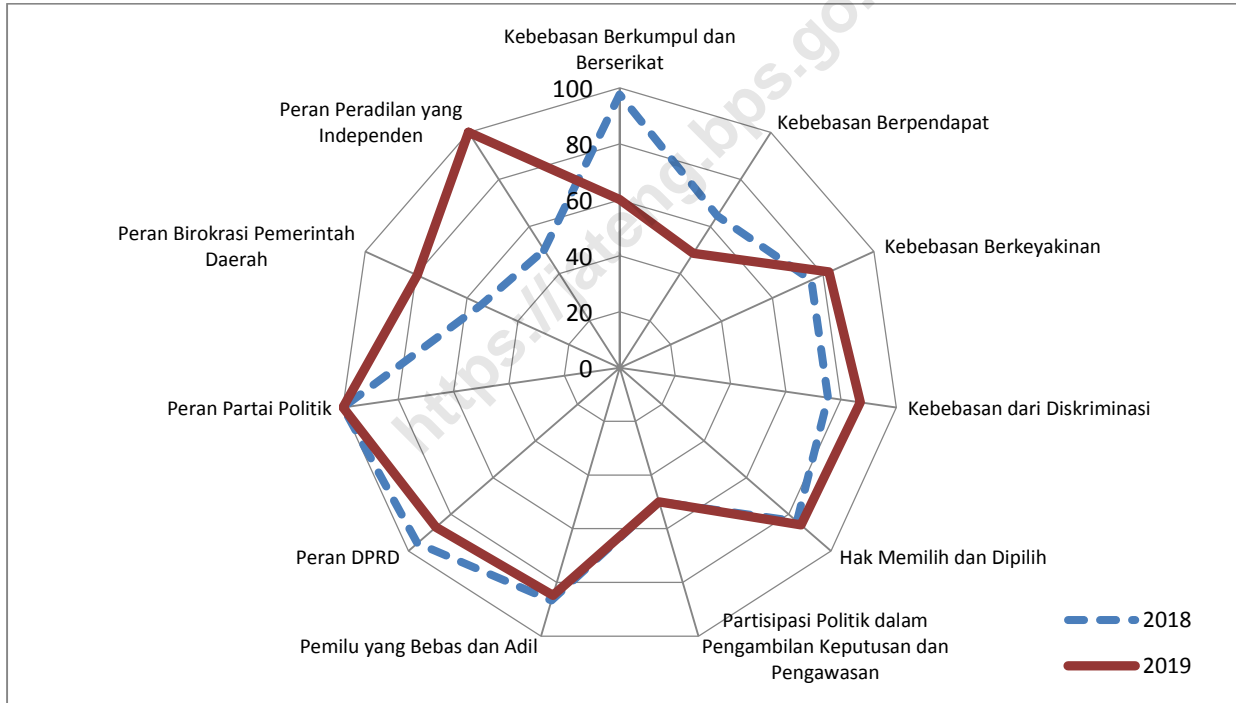
Pada Tahun 2019 terdapat 4 (empat) variabel yang mengalami penurunan indeks, 5 (lima) variabel mengalami peningkatan dan 2 (dua) variabel yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018. Dari 4 (empat) variabel yang mengalami penurunan, variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat menurun cukup tajam, yakni sebesar 37,50 poin, dari nilai 97,66 pada 2018 menjadi 60,16 pada 2019, yang mengakibatkan capaiannya mengalami pergeseran dari kategori “baik” di tahun 2018 menjadi kategori “sedang” pada 2019.

Selain variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, variabel Kebebasan Berpendapat juga mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu 15,97 poin. Penurunan nilai indeks variabel ini menyebabkan capaian indeks variabel Kebebasan Berpendapat bergeser dari kategori “sedang” pada tahun 2018 menjadi kategori “buruk” pada tahun 2019, yaitu dari 64,56 pada 2018 menjadi 48,59 pada 2019.

Variabel lain yang juga mengalami penurunan antara lain variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan nilai indeks yang turun 1,87 poin, dari 86,71 (2018) menjadi 84,84 (2019) dan variabel Peran DPRD yang turun sebesar 8,76 poin, dari 95,77 (2018) menjadi 87,01 (2019). Meskipun keduanya menurun, namun masih tetap dalam kategori “baik”.

Di sisi lain, variabel Peran Peradilan yang *Independen* meningkat secara bermakna sebesar 50,00 poin, dari 50,00 pada 2018 menjadi 100,00 pada 2019. Peningkatan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Kebebasan Peran Peradilan yang *Independen*, yang semula berada di kategori “buruk” pada tahun 2018 dan memasuki kategori “baik” pada tahun 2019. Variabel Kebebasan Berkeyakinan juga mengalami peningkatan nilai indeks sebesar 6,94 poin, yaitu dari 75,38 (2018) menjadi 82,32 (2019), yang juga mengubah posisi variabel Kebebasan Berkeyakinan menjadi kategori “baik” pada 2019 dari sebelumnya tercatat sebagai kategori “sedang” (2018). Demikian pula variabel Kebebasan dari Diskriminasi yang mengalami peningkatan sebesar 11,72 poin, dari 75,25 (2018) menjadi 86,97 (2019). Hal tersebut juga mengubah posisi variabel Kebebasan dari Diskriminasi menjadi kategori “baik” pada 2019 dari sebelumnya masih pada kategori “sedang” (2018).

Grafik 4. Perkembangan Indeks Variabel IDI di Jawa Tengah, 2018 - 2019



Variabel lain yang juga mengalami peningkatan nilai indeks adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, yang meningkat sebesar 25,26 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya (54,30 pada 2018 menjadi 79,56 di 2019). Peningkatan tersebut mengubah posisi variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menjadi kategori “sedang” (2019) dari kondisi kategori “buruk” (2018). Sedangkan variabel Hak Memilih dan Dipilih, yang juga mengalami peningkatan nilai indeks namun tidak mengalami pergeseran capaian. Jika di tahun 2018 variabel Hak Memilih dan Dipilih bernilai 83,84 maka pada tahun 2019 variabel ini meningkat 1,98 poin, menjadi 85,82 dengan capaian kinerja berada pada kategori “baik”.

3. Skor Indikator IDI

Pada tahun 2019, dari 28 indikator IDI, tercatat 17 indikator yang memiliki skor dengan kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu:

- a. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya,
- b. Indikator 6, Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya,

- c. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya,
- d. Indikator 10, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya,
- e. Indikator 11, Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat,
- f. Indikator 12, Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih,
- g. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT),
- h. Indikator 14, Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*),
- i. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
- j. Indikator 19, Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara,
- k. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD,

- l. Indikator 21, Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan,
- m. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu,
- n. Indikator 24, Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi,
- o. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,
- p. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial, dan
- q. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Namun demikian, pada tahun 2019 masih ditemukan 6 (enam) indikator demokrasi dengan skor berkategori “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja IDI yang lebih baik. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 2, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,

- b. Indikator 3, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- c. Indikator 4, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat,
- d. Indikator 9, Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya,
- e. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, dan
- f. Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN.

Tabel 2. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Kebebasan Sipil, 2013 – 2019

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Kebebasan Sipil		79,18	87,87	79,44	66,06	69,07	76,21	78,43
I	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	35,00	91,25	92,97	12,50	6,25	97,66	60,16
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	40,00	90,00	100,00	0,00	0,00	100,00	62,50
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	0,00	100,00	43,75	100,00	50,00	81,25	43,75
II	Kebebasan Berpendapat	61,09	76,12	72,89	75,70	61,82	64,56	48,59
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	73,33	73,33	87,50	70,83	54,17	75,00	58,33
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	90,00	0,00	100,00	100,00	12,50	00,00

III	Kebebasan Berkeyakinan	81,31	87,06	71,58	66,51	81,54	75,38	82,32
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	91,30	91,30	83,70	86,96	86,96	78,26	82,61
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	100,00	87,50	68,75	43,75	50,00	50,00	100,00
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	30,00	70,00	25,00	0,00	80,00	80,00	70,00
IV	Kebebasan dari Diskriminasi	96,53	93,23	96,43	80,03	63,53	75,25	86,97
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	100,00	53,13
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	90,00	100,00	50,00	0,00	25,00	100,00

Tabel 3. Skor Indikator IDI Menurut Hak-Hak Politik, 2013 – 2019

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Hak-Hak Politik		46,29	67,08	67,24	67,24	67,24	66,92	67,91
V	Hak Memilih dan Dipilih	42,59	84,16	84,48	84,48	84,48	83,84	85,82
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga	34,62	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95	87,18
12	kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	97,32
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	89,65	89,65	89,65	89,65	89,65	89,60
14	<i>Voters turnout</i>	71,26	73,24	73,24	73,24	73,24	73,24	80,04
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	70,00	76,67	80,00	80,00	80,00	73,33	63,90
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Lembaga Demokrasi, 2013 – 2019

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Lembaga Demokrasi		60,89	80,77	61,48	66,69	78,82	75,42	90,50
VII	Pemilu yang Bebas dan Adil	94,94	86,71	86,71	86,71	86,71	86,71	84,84
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	77,27
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	89,87	73,42	73,42	73,42	73,42	73,42	92,41
VIII	Peran DPRD	43,32	43,22	46,75	50,50	79,74	95,77	87,01
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	54,97	54,81	63,17	56,72	88,18	94,58	95,50
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	41,18	41,18	28,57	80,00	66,67	100,00	82,36
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3,57	3,57	3,57	3,57	60,71	96,43	60,71
IX	Peran Partai Politik	100,00	99,96	48,49	74,29	100,00	100,00	100,00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100,00	100,00	42,86	71,43	100,00	100,00	100,00
24	% perempuan dalam kepengurusan partai politik	100,00	99,64	99,19	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. (Lanjutan)

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Lembaga Demokrasi		60,89	80,77	61,48	66,69	78,82	75,42	90,50
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80,30	98,48	30,13	27,43	83,16	54,30	79,56
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	-	-	26,32	10,53	63,16	0,00	55,26
	Laporan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol dalam pemilu legislatif	90,90	100,00	-	-	-	-	-
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	-	-	33,33	41,66	100,00	100,00	100,00
	Laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu legislatif	69,70	96,97	-	-	-	-	-
XI	Peran Peradilan Yang Independen	0,00	75,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

VIII. Penutup

Data IDI sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan politik dan demokrasi sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah baik dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan bidang politik maupun dalam mengambil kebijakan sangat bergantung kepada *stakeholder* yang terkait, mulai dari kelompok kerja IDI dalam menyosialisasikan data IDI, pemerintah/instansi hingga partai politik yang terlibat dalam pengumpulan data IDI. Oleh karena itu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan serta untuk meningkatkan perkembangan demokrasi dan pembangunan di bidang politik, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sangat diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terlibat.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241
Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195
Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail: jateng@bps.go.id

ISBN 978-602-5419-91-1



9 786025 419911